

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, (2010) Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta Sinar Grafik.
- Amiruddin, Zainal Asikin. (2003). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Antonius Sujata dan Surahman (2022), Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasioanl, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.
- Bambang Waluyo. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Bungin. (2001). Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metode Logis Ke Arah Ragam Variasi Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (2015). Buku Panduan Akademik. Universitas Malikussaleh.
- Haryatmoko. (2011). Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Gramedia Pusat Jakarta.
- Hendra Nurtjahjo, dkk. (2013) Memahami Maladministrasi. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- Husni Thamrin. (2013). Hukum Pelayanan Publik di Indonesia. Jakarta: Aswaja Persindo.
- Irawan Soehartono. (2011). Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miftah Thoha. (2010) Birokrasi Pemerintahan Indonesia Di Era Reformasi, Jakarta: Kencana,
- Pusat Data dan Analisa Tempo. (2022). Perjalanan Komisi Ombudsman. Jakarta: TEMPO Publishing.
- R. Soeroso. (2005). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HR. (2011). Hukum Admistrasi Negara. Yogyakarta: PT. Rajagrafinfo Persada, Yogyakarta.

Sajtipto Rahardjo. (2009). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.

Surisno Hadi. (2004). *Metodologi Research, untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, dan Disertasi, Jilid II*. Yogyakarta: ANDI.

W. Riawan Tjandra. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.

C. Jurnal, Artikel dan Kajian Ilmiah Lainnya

Hendrikus Deo Peso dan Edi Pranoto, (2022). Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Juristic* Volume 03 No. 01.

Indra Wijaya, (2023). 201 Laporan Pelayanan Publik Masuk ke Ombudsman, 70 Diantaranya Masalah Kepegawaian, *Serambi News*.

Intan, DM. (2021) Mengenal Maladministrasi. *Artikel Ombudsman Republik Indonesia*.

Isnaini, (2022). Peran Ombudsman perwakilan NTB dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap pelayanan di kantor pertanahan Kota Mataram. *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram*.

M. Haris Setiady Agus. (2023). Ombudsman Aceh tangani 123 pengaduan terkait pelayanan publik. Diakses dari:

https://www.antaraneews.com/berita/3475917/ombudsman-aceh-tangani-123-pengaduan-terkait-pelayanan-publik?utm_medium=mobile.

Nasir Nurdin, (2021). Sepanjang 2020 Ombudsman Aceh Terima 168 Laporan, Serambi News.

Nikita Rosa. (2022) Apa itu Ombudsman? Ini Pengertian hingga Tugasnya. Diakses dari: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6362040/apa-itu-ombudsmanini-pengertian-hingga-tugasnya>.

Nugraha, A. (2021). Yuk Kenali Bentuk-Bentuk Maladministrasi, Artikel Ombudsman Republik Indonesia.

Nurhayati. (2015). Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Maladministrasi. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Ombudsman Republik Indonesia. Sekilas Ombudsman, Sejarah Ombudsman di Dunia. Diakses dari: <https://www.ombudsman.go.id/profiles/index/pftt>.

Pertiwi Dwi Juliana, (2019). Pengawasan Ombudsman Terhadap Pelayanan Administrasi Rumah Sakit Pemerintah di Kota Medan (Studi di Kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Sitoresmi, AR. (2023) Ombudsman adalah Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Ini Tugas dan Cara Lapornya. Diakses dari: <https://www.liputan6.com/hot/read/5306997/ombudsman-adalah-lembagapengawas-pelayanan-publik-ini-tugas-dan-cara-lapornya?page=3>

Trisno dkk. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksekutif Vol 1 No. 1.

Yarmen Dinamika, (2022). Laporan ke Ombudsman Aceh Tahun 2021 Naik Drastis, Pemko Banda Aceh yang Paling Banyak Dilaporkan, Serambi News.